

# Representasi Kekuasaan dalam Teks Pidato Presiden Joko Widodo: AWK Norman Fairclough

Hajrah<sup>1</sup>

Jufri<sup>2</sup>

Ambo Dalle<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Pendidikan Bahasa Pascasarjana UNM

<sup>1</sup>[Hajraputriharun2006@gmail.com](mailto:Hajraputriharun2006@gmail.com)

<sup>2</sup>[jufri@unm.ac.id](mailto:jufri@unm.ac.id)

<sup>3</sup>[ambo.dalle1959@unm.ac.id](mailto:ambo.dalle1959@unm.ac.id)

## Abstrak

Penelitian ini memiliki tiga tujuan, yakni (1) mengungkap nilai eksperensial, (2) mengungkap nilai relasional, (3) mengungkap nilai ekspresif dalam teks pidato Presiden Joko Widodo pada HUT RI ke-71, 73, 75, dan 77. Penelitian ini merupakan kajian analisis wacana dalam bentuk analisis wacana kritis (AWK). Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa kata, frasa, kalusa, dan kalimat yang terindikasi nilai eksperensial, nilai relasional, dan nilai ekspresif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, teknik pustaka, dan teknik catat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan pada aspek nilai eksperensial ditemukan kata-kata ideologis yang diperjuangkan, proses leksikal, relasi makna ideologis, dan metafora. Nilai relasional ditemukan penggunaan modalitas (akan, harus, mampu, ingin), dan kata ganti. Nilai ekspresif ditemukan penggunaan ekspresi penguatan, ekspresi penolakan, ekspresi simbolik, evaluasi positif, dan evaluasi negatif.

**Kata kunci:** analisis wacana kritis, nilai eksperensial, nilai relasional, nilai ekspresif, pidato presiden.

## Abstract

*This research has three objectives: (1) to reveal experiential values, (2) to reveal relational values, and (3) to reveal expressive values in the speeches of President Joko Widodo during the 71st, 73rd, 75th, and 77th Independence Day celebrations. This study is a discourse analysis in the form of critical discourse analysis (CDA). The data required for this research include words, phrases, clauses, and sentences indicating experiential, relational, and expressive values. The data collection techniques used in this research are documentation, library research, and note-taking techniques. The results show that in the aspect of experiential values, ideological words being advocated, lexical processes, ideological meaning relations, and metaphors were found. Relational values were found in the use of modalities (will, must, able, want) and pronouns. Expressive values were found in the use of reinforcement expressions, rejection expressions, symbolic expressions, positive evaluations, and negative evaluations.*

**Keywords:** *critical discourse analysis, experiential values, relational values, expressive values, presidential speech.*

## **Pendahuluan**

Pidato sebagai salah satu teks adalah satu sistem tanda terorganisasi yang merefleksikan sikap, keyakinan, dan nilai-nilai tertentu. Pidato merupakan salah satu wadah untuk mengekspresikan dan menyampaikan informasi atau opini seseorang di depan khalayak umum. Tidak hanya untuk menyampaikan tanggapan dari individu, pidato juga digunakan untuk menyampaikan keresahan masyarakat (Jupriono dalam Ramadani, 2021). Salah satunya pidato yang disampaikan oleh presiden Joko Widodo.

Norman Fairclough berusaha mengembangkan konsep wacana dengan mengintegrasikan sejumlah tradisi ilmiah, seperti linguistik, tradisi interpretatif, dan sosiologi. Dalam kerangka teorinya, Fairclough memperkenalkan model diskursus yang terdiri dari tiga dimensi utama: teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Setiap dimensi ini memiliki cakupan dan prosesnya sendiri, dan ketiganya saling terkait secara dinamis. Teks, sebagai dimensi pertama, mencakup produk akhir dari proses produksi wacana, termasuk pilihan bahasa dan struktur kalimat. Praktik diskursif, sebagai dimensi kedua, berkaitan dengan interaksi antara teks dan individu atau masyarakat selama proses produksi dan interpretasi wacana, yang melibatkan cara orang membaca, memahami, dan merespons teks. Dimensi ketiga, yaitu praktik sosial, mencakup konteks sosio-kultural yang memengaruhi proses produksi dan interpretasi wacana, termasuk konteks situasional, institusional, dan sosial. Fairclough menganalisis ketiga dimensi ini menggunakan tiga model analisis yang berbeda, yaitu deskripsi untuk elemen linguistik dalam teks, interpretasi untuk proses produksi dan interpretasi teks, serta eksplanasi untuk menganalisis praktik-praktik sosio-kultural dalam konteks situasional, institusional, dan sosial (Munfarida, 2014).

Penelitian ini menganalisis teks pidato presiden karena dalam teks pidato presiden Joko Widodo banyak ditemukan kata, frasa, dan kalimat yang termasuk nilai eksperensial, nilai relasional, dan nilai ekspresif yang dapat memudahkan penelitian untuk dianalisis. Selain itu, Penelitian ini menarik karena sumber datanya adalah pidato Presiden Joko Widodo. Joko Widodo merupakan presiden yang sebelumnya pernah menjadi Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012, dan menjadi memenangkan pemilu presiden pada tahun 2014 hingga saat ini telah menjabat pada periode kedua dan bahasa yang digunakan oleh Joko Widodo karena tentu ada kekuasaan di dalamnya.

## **Metode**

Penelitian ini merupakan kajian analisis wacana dalam bentuk analisis wacana kritis (AWK). Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa kata, frasa, dan kalimat yang menunjukkan aspek nilai eksperensial, aspek nilai relasional, dan aspek nilai ekspresif yang digunakan Presiden Joko Widodo dalam menyampaikan pesan melalui teks pidato. Sumber data yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 4 dari 10 teks pidato pada HUT RI Presiden Joko Widodo yang ditelusuri menggunakan internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan analisis dokumen.

## Hasil

### Representasi Kekuasaan dalam Teks Pidato Presiden Joko Widodo pada Aspek Nilai Eksperensial

Nilai eksperensial dalam penelitian ini adalah nilai yang memiliki relasi makna dalam teks dan berupaya menspesifikasikan basis-basis ideologi yang meliputi kata-kata meyakinkan, dramatis, dan komunikatif.

#### Data 1

*Pemerintah terus berupaya meningkatkan profesionalisme TNI dan Polri dengan pendekatan kesejahteraan dan **modernisasi persenjataan**. Pemerintah juga mendukung kemandirian industri dalam negeri untuk **memasok alutsista TNI** dan alat operasional Polri. (D1.1. P1, Selasa, 16 Agustus 2016)*

Penggalan pidato tersebut menunjukkan data yang mengungkapkan nilai eksperensial dalam teks pidato presiden Joko Widodo. Nilai eksperensial yang dianalisis adalah kata-kata ideologis yang diperjuangkan yang ditandai dengan klausa “modernisasi persenjataan” dan “memasok alutsista TNI”. Melalui penggunaan frasa tersebut dapat dianalisis bahwa pemerintah terus melakukan upaya untuk memodernisasi persenjataan dan juga mendukung pasokan alutsista TNI. Kata-kata ideologis yang diperjuangkan tersebut mengandung kekuasaan karena termasuk dalam bentuk mengontrol orang lain dalam hal ini mengontrol Menhan agar melakukan modernisasi persenjataan dan memasok alutsista TNI.

Berdasarkan pidato yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, menteri pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto telah melakukan modernisasi alutsista. Pada teks berita online di media daring “Berita Satu” yang dipublikasi pada tanggal 10 Januari 2024 yang berjudul “Pengamat Militer: Kemenhan Dipimpin Prabowo Subianto Berhasil Modernisasi Alutsista” menyampaikan bahwa: Pengamat militer Alman Helvas Ali menilai Kementerian Pertahanan atau Kemenhan saat ini telah berhasil dalam memodernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari anggaran pertahanan yang ditetapkan Presiden Jokowi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo mendominasi Menhan Prabowo Subianto agar melakukan modernisasi alutsista sebagaimana telah disampaikan pada pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo pada HUT RI ke-69 bersungguh-sungguh dalam upaya modernisasi militer dan kepolisian, dan hasilnya terlihat dalam keberhasilan Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Menteri Prabowo Subianto untuk mencapai modernisasi alutsista.

#### Data 2

*Kita bekerja memastikan bahwa setiap anak Indonesia dapat lahir dengan sehat, dapat tumbuh dengan gizi yang cukup, bebas dari stunting atau tumbuh kerdil. Ketika mereka memasuki usia sekolah, tidak boleh lagi anak-anak kita, termasuk anak-anak yatim piatu, terpaksa putus sekolah karena alasan biaya pendidikan yang tidak terjangkau. Komitmen ini kita wujudkan melalui **pembagian Kartu Indonesia Pintar**, yang pada tahun 2017 sudah mencapai lebih dari 20 juta peserta didik, serta perluasan penyaluran program beasiswa Bidik Misi bagi mahasiswa. (D1.2. P2, Kamis, 16 Agustus 2018)*

Penggalan pidato tersebut menunjukkan data yang mengungkapkan nilai eksperensial dalam teks pidato presiden Joko Widodo. Nilai eksperensial yang dianalisis adalah kata-kata ideologis yang diperjuangkan yang ditandai dengan klausa “pembagian Kartu Indonesia Pintar” dan “beasiswa Bidik Misi”. Melalui penggunaan frasa tersebut dapat dianalisis bahwa pada pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo terus melakukan upaya agar semua anak bisa merasakan pendidikan yang sama. Kata-

kata ideologis yang diperjuangkan tersebut mengandung kekuasaan karena termasuk dalam bentuk mengontrol orang lain dalam hal ini mengontrol Mendikbud menyediakan KIP dan beasiswa BM untuk anak-anak dari keluarga yang kurang mampu agar mereka juga bisa bersekolah.

Berdasarkan pidato yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menjelaskan dalam berita yang online Detik News yang dipublikasi pada 28 Maret 2021 bahwa dalam 10 tahun terakhir, jumlah mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang menerima beasiswa Bidikmisi dan KIP Kuliah sudah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Seperti yang disampaikan “Peningkatan secara signifikan terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar 130.000 penerima dan tahun 2020 sebesar 200.000 penerima”.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo mendominasi Mendikbud agar terus melakukan pemerataan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu untuk diberikan KIP dan beasiswa BM sebagaimana telah disampaikan pada pidato Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2018 agar tidak ada lagi anak yang putus sekolah dengan alasan tidak ada biaya.

### Data 3

*Sudah 71 tahun Indonesia merdeka, kita belum mampu memutus rantai kemiskinan, memutus rantai pengangguran, memutus rantai ketimpangan dan kesenjangan sosial.* (D1.3. P1, Selasa, 16 Agustus 2016)

Penggalan pidato tersebut menunjukkan data yang mengungkapkan nilai eksperensial dalam teks pidato presiden Joko Widodo. Nilai eksperensial yang dianalisis adalah proses leksikalisasi yaitu pengulangan kata atau duplikasi yang ditandai dengan frasa ‘memutus rantai’. Penggunaan frasa ‘memutus rantai’ digunakan oleh Presiden Joko Widodo untuk memberikan penekanan atau intensitas pada masalah yang ingin disampaikan. Dengan mengulang frasa ‘memutus rantai’, Presiden Joko Widodo ingin menyampaikan pesan bahwa meskipun sudah 71 tahun Indonesia merdeka, tantangan-tantangan seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan kesenjangan sosial masih belum berhasil diatasi. Proses leksikalisasi tersebut mengandung kekuasaan karena termasuk dalam bentuk meyakinkan orang lain bahwa di Indonesia masih banyak masyarakat dengan keadaan miskin, menganggur, dan terjadi ketimpangan sosial dengan cara mengulang pernyataan “memutus rantai”.

Kalimat yang disampaikan Presiden Joko Widodo sebelumnya yaitu “Berbekal pencapaian transformasi fundamental ekonomi, memasuki tahun kedua, Pemerintah bertekad melakukan percepatan pembangunan”. Melihat konteks tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan solusi sebelum menyampaikan yang menjadi permasalahan yang masih belum teratasi walau kemerdekaan Indonesia sudah terbilang lama. Percepatan Pembangunan yang dimaksud oleh beliau adalah Pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya berfokus pada Pulau Jawa.

### Data 4

*Sekarang ini biduk kita sedang berlayar menuju ke sana.* (D1.4. P1, Selasa, 16 Agustus 2016)

Penggalan pidato tersebut menunjukkan data yang mengungkapkan nilai eksperensial dalam teks pidato presiden Joko Widodo. Nilai eksperensial yang dianalisis adalah metafora ditandai dengan klausa ‘biduk kita sedang berlayar’. Klausa tersebut digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan bahwa saat ini kita sedang dalam proses menuju tujuan yang diinginkan, yaitu menjadi bangsa yang pemenang, maju,

berdaulat, mandiri, dan berbudaya. Metafora tersebut mengandung kekuasaan karena ada ideologi yang ingin disampaikan melalui penggunaan kata yang bukan arti sebenarnya.

'Biduk' dalam konteks ini diartikan masyarakat Indonesia, sedangkan 'berlayar menuju ke sana' mencerminkan upaya dan perjuangan yang sedang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, pesan yang ingin disampaikan oleh Presiden Joko Widodo adalah dengan usaha nyata dan kerja keras, Indonesia dapat mencapai kemajuan dan menjadi bangsa yang diinginkan oleh bersama.

### **Kekuasaan dalam Teks Pidato Presiden Joko Widodo pada Aspek Nilai Relasional**

Nilai relasional adalah nilai yang memfokuskan pada penggunaan kata dalam teks yang berperan pada penciptaan relasi sosial yang meliputi kata-kata penghalusan makna dan kata formal berupa kosakata yang digunakan oleh kalangan kelas atas.

#### **Data 5**

*Untuk mencapai semua itu, kita harus membangun. Bangunlah jiwanya! Bangunlah badannya! Dari Sabang sampai Merauke harus kita bangun. Dari Miangas hingga Rote harus kita bangun. Kita harus menjadi bangsa yang maju, Indonesia maju, bangsa yang berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.* (D2.1. P1, Selasa, 16 Agustus 2016)

Penggalan pidato tersebut menunjukkan data yang mengungkapkan nilai relasional dalam teks pidato presiden Joko Widodo. Nilai relasional yang dianalisis adalah kalimat perintah atau kalimat imperatif. Kalimat imperatif yang terdapat dalam data tersebut merupakan perintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo memberikan instruksi kepada menteri-menteri untuk melakukan tindakan yaitu membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. Kalimat imperatif tersebut mengandung kekuasaan karena merupakan bentuk perintah dari presiden kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Berdasarkan paparan tersebut, dalam pidato Presiden Joko Widodo memiliki nilai relasional yang menunjukkan kekuasaan yang bersifat perintah kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Pada pidato yang disampaikan dilanjutkan dengan penggalan pidato "Kita juga telah tetapkan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok Tanah Air khususnya di desa-desa, di daerah-daerah pinggiran dan wilayah perbatasan guna memperkuat konektivitas nasional kita". Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo dilakukan tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga mengharapkan pembangunan di seluruh pelosok Indonesia.

Pada debat cawapres yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu 21 Januari 2024, pukul 19.00 WIB. Cawapres nomor urut 2 Muhaimin Iskandar atau yang kerap disapa Cak Imin menyampaikan bahwa "Hari ini sekitar 13.000 desa yang tertinggal sudah menjadi desa maju dan mandiri. Sisanya 4.000 saja. Ini bukti infrastruktur kita berjalan dengan baik, dana desa berjalan dengan baik". Hal ini menunjukkan bahwa pidato yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2016 lalu telah dilakukan dan ditindaklanjuti sebagai sebuah perubahan sosial. Ini menunjukkan bahwa Presiden mendominasi Menteri PUPR untuk melaksanakan pemerintahannya untuk pembangunan infrastruktur.

#### **Data 6**

*Oleh karena itu saya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus meneguhkan komitmen bersama mencegah dan melawan aksi terorisme. Mari kita tegaskan bahwa tidak ada tempat untuk terorisme di Nusantara yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. (D2.2. P2, Kamis, 16 Agustus 2018)*

Penggalan pidato tersebut menunjukkan data yang mengungkapkan nilai relasional dalam teks pidato presiden Joko Widodo. Nilai relasional yang dianalisis adalah kalimat imperatif. Kalimat imperatif yang terdapat dalam data tersebut merupakan perintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo memberikan instruksi kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan tindakan pencegahan dan melawan aksi terorisme di Indonesia. Kalimat imperatif tersebut mengandung kekuasaan karena merupakan bentuk perintah dari presiden kepada seluruh masyarakat untuk mencegah dan melawan teroris dan tidak memberikan tempat untuk para teroris di Indonesia.

Berdasarkan paparan tersebut, dalam pidato Presiden Joko Widodo memiliki nilai relasional yang menunjukkan kekuasaan yang bersifat perintah kepada seluruh lapisan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, pada 5 Januari 2021 terdapat berita dengan judul “Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Terorisme” yang berisi ungkapan tentang upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam mengatasi terorisme yaitu “Indonesia mengesahkan Peraturan Bersama yang berkaitan dengan Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Terduga Teroris dan melakukan pemblokiran dana milik orang atau korporasi yang diduga sebagai teroris”. Hal ini menunjukkan bahwa pidato yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2016 telah ditindaklanjuti yang merupakan sebuah perubahan sosial dan menunjukkan dominasi Presiden Joko Widodo dalam mengatasi terorisme di Indonesia.

#### **Data 7**

*Nilai investasi BUMN akan terus kita perbesar. (D2.3. P1, Selasa, 16 Agustus 2016)*

Dari data tersebut menunjukkan bahwa nilai investasi BUMN belum terjadi. Kekuasaan Presiden Joko Widodo dalam teks pidato pada data tersebut ditunjukkan melalui nilai eksperensial penggunaan modalitas ‘akan’ yang bermakna bahwa nanti yang disampaikan tersebut dilakukan. Dalam perspektif wacana kritis, semua program Presiden Joko Widodo dikategorikan belum terjadi karena pilihan kata modalitas yang digunakan dalam teks pidato adalah kata ‘akan’.

Namun pada kenyataannya, hal-hal yang disampaikan tersebut sudah ada upaya yang dilakukan oleh presiden Joko Widodo, salah satunya yang berkaitan dengan peningkatan nilai BUMN. Dalam situs berita online “Investor.Id” yang dipublikasikan pada 19 Maret 2023 terdapat berita tentang peningkatan BUMN “Setiap tahun kontribusi BUMN atas perekonomian negara terus meningkat tajam. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, laba BUMN hingga kuartal III-2022 mencapai sebesar Rp 155 triliun, atau meningkat 154 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2021 yang senilai Rp 61 triliun. Kinerja positif ini turut meningkatkan kontribusi BUMN terhadap pendapatan negara berupa pajak, dividen, dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 68 miliar, yakni dari Rp 1.130 triliun (periode 2017 sampai 2019) menjadi Rp 1.198 T (2020 hingga kuartal III-2022).”

Hal tersebut menunjukkan bahwa modalitas “akan” yang digunakan oleh Presiden Joko Widodo memiliki kekuasaan karena pidato yang menggunakan modalitas “akan” telah diupayakan. Misalnya peningkatan BUMN, ini artinya perubahan yang terjadi karena adanya pidato Presiden yang memberikan arahan agar investasi BUMN terus ditingkatkan.

#### **Data 8**

*Itulah sebabnya infrastruktur tidak hanya dibangun di Jawa, tapi di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara, sampai Tanah Papua karena, sebagai bangsa yang majemuk, kita ingin tumbuh bersama, sejahtera bersama, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. (D2.4. P2, Kamis, 16 Agustus 2018)*

Pada data (8) menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo mengharapkan pembangunan infrastruktur bisa merata ke pulau-pulau yang lain, dan pembangunan tersebut tidak hanya berpusat di Pulau Jawa agar seluruh bangsa Indonesia bisa tumbuh dan Sejahtera bersama. Presiden Joko Widodo menyampaikan keinginannya tersebut karena melihat sepanjang sejarah, yang selalu menjadi pusat pembangunan adalah Pulau Jawa.

Pada hakikatnya, janji yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada pidato yang disampaikan tersebut bukan hanya sekedar janji, tetapi sudah ada upaya yang dilakukan dan tindak lanjut dari apa yang sudah dijanjikan tersebut. Salah satu contoh yang telah dilakukan adalah pemerataan infrastruktur. Dikutip dari Portal Informasi Indonesia yang dipublikasi pada 6 Agustus 2023 bahwa Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan, dari target 125 PSN tersebut, hingga Juli 2023 Kementerian PUPR telah menyelesaikan 87 PSN atau 70% dari keseluruhan target yang telah ditetapkan.

“Pada akhir 2023, kami menargetkan penyelesaian pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang dan 24 proyek PSN lainnya,” jelas Menteri Basuki dalam kegiatan *Conference of Sewindu National Strategic Projects (PSN)* dengan tema “*Sustainable Infrastructure Towards Indonesia Emas 2045*”, yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian di Jakarta, Rabu (26/7/2023). Hal tersebut menunjukkan dominasi Presiden Joko Widodo terhadap Menteri PUPR karena apa yang disampaikan presiden Joko Widodo pada pidatonya telah dilakukan dan sudah berjalan 70% dari 100% target.

Hal tersebut menunjukkan bahwa modalitas “ingin” yang digunakan oleh Presiden Joko Widodo memiliki kekuasaan karena pidato yang menggunakan modalitas “ingin” telah dilakukan meskipun baru berjalan sekitar 70%. Tetapi, sudah menunjukkan adanya usaha dari Menteri PUPR untuk menindaklanjuti apa yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya.

## **Data 9**

*Ketika krisis kesehatan tersebut berdampak pada perekonomian nasional, kita juga harus cepat bergerak. (D2.5. P3, Minggu, 16 Agustus 2020)*

Modalitas ‘harus’ sebagai kata adjektif yang berarti patut, wajib, mesti (tidak boleh tidak) harus dikerjakan. Jika tidak dilakukan akan ada dampaknya, seperti mendapat teguran atau hukuman. Pada data tersebut terdapat kekuasaan Presiden Joko Widodo pada aspek nilai relasional ditunjukkan melalui modalitas ‘harus’. Modalitas ‘harus’ tersebut digunakan Presiden Joko Widodo agar para Menteri yang berkaitan segera melakukan apa yang menjadi masalah yang harus diselesaikan.

Pada data (9) menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo mengharapkan percepatan pergerakan yaitu memberikan bantuan sosial bagi masyarakat melalui bantuan sembako, bansos tunai, subsidi dan diskon tarif listrik, BLT Desa, dan subsidi gaji; membantu UMKM untuk memperoleh restrukturisasi kredit, memperoleh banpres produktif berupa bantuan modal darurat, dan membantu pembelian produk-produk mereka; membantu tenaga kerja yang menjadi korban PHK, antara lain melalui bantuan sosial dan Program Kartu Prakerja.

### Data 10

*Proses administrasi dan persidangan perkara di Mahkamah Agung secara elektronik telah mampu mempercepat penanganan perkara. (D2.6. P4, Selasa, 16 Agustus 2022)*

Modalitas 'mampu' berarti memiliki kuasa (bisa, sanggup, dapat) untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan data tersebut ditemukan kekuasaan Presiden Joko Widodo yang ditunjukkan melalui kata kerja bantu yaitu mampu sebagai modalitas yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan yang disampaikan. Pada data (10) menunjukkan bahwa proses administrasi dan persidangan perkara di MA dapat ditangani secara cepat.

### Data 11

*Yang **saya** hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (D2.7. P1, Selasa, 16 Agustus 2016)*

Penggunaan kata ganti 'saya' digunakan oleh Presiden Joko Widodo sebagai subjek utama. Penggunaan 'saya' secara konsisten menegaskan peran Presiden sebagai aktor utama yang memiliki kekuasaan dan otoritas dalam konteks pidato tersebut. Penggunaan 'saya' untuk memberi hormat kepada berbagai tokoh menunjukkan pengakuan dan penghargaan Presiden terhadap kontribusi mereka, memperkuat citra kesopanan dan penghargaan terhadap orang lain. Penggunaan kata ganti 'saya' juga berperan dalam menciptakan suasana formal dan resmi dalam pidato, mencerminkan posisi dan wibawa Presiden dalam peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia.

### Data 12

*Masih segar dalam ingatan **kita**, pada tanggal 14 Januari 2016 di Jalan MH Thamrin, Jakarta, teroris mencoba menimbulkan kepanikan masyarakat. (D2.8. P1, Selasa, 16 Agustus 2016)*

Penggunaan kata ganti 'kita' dalam teks pidato Presiden Joko Widodo menunjukkan upaya untuk membangun rasa solidaritas dan kepemilikan bersama atas isu-isu yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Penggunaan kata ganti 'kita' menunjukkan bahwa Presiden tidak hanya melihat dirinya sendiri atau pemerintah sebagai aktor utama, tetapi juga mengikutsertakan seluruh masyarakat dalam upaya penyelesaian masalah dan pencapaian tujuan bersama.

### Kekuasaan dalam Teks Pidato Presiden Joko Widodo pada Aspek Nilai Ekspresif

Nilai ekspresif dalam penelitian ini adalah nilai yang bermakna tentang evaluasi yang dilakukan oleh penutur tentang realitas yang terkait. Berikut data yang ditemukan dalam teks pidato Presiden Joko Widodo.

### Data 13

*Percepatan pembangunan infrastruktur **bukan hanya** dimaksud untuk mengejar ketertinggalan kita dalam pembangunan infrastruktur dibanding dengan negara lain, **melainkan juga** menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru yang mampu memberikan nilai tambah bagi daerah-daerah di seluruh penjuru tanah air. (D3.1. P2, Kamis, 16 Agustus 2018)*

Penggalan pidato tersebut menunjukkan data yang mengungkapkan nilai ekspresif dalam teks pidato presiden Joko Widodo. Nilai ekspresif yang dianalisis adalah ekspresi penguatan yang ditandai dengan klausa 'bukan hanya' dan 'melainkan juga'. Makna di balik pernyataan tersebut adalah bahwa percepatan pembangunan

infrastruktur tidak hanya bertujuan untuk mengejar ketertinggalan kita dalam hal pembangunan infrastruktur dibandingkan dengan negara lain.

Lebih dari itu, pembangunan infrastruktur yang cepat juga dimaksudkan untuk menciptakan pusat-pusat ekonomi baru yang dapat memberikan nilai tambah bagi daerah-daerah di seluruh Indonesia. Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur yang cepat diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh negeri, memperbaiki konektivitas antardaerah, meningkatkan aksesibilitas, dan pada gilirannya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dikutip dari Kompas.id yang dipublikasi pada 4 Januari 2023 "Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol Pekanbaru-Padang seksi Pekanbaru-Bangkinang sepanjang 30,9 kilometer, Rabu (4/1/2023). Jalan tol ini diharapkan meningkatkan mobilitas masyarakat, termasuk menciptakan sentra ekonomi baru, yang pada akhirnya bermuara pada penyerapan tenaga kerja. Ini menunjukkan adanya dominasi Presiden Joko Widodo terhadap menteri-menteri yang berkaitan dengan Pembangunan infrastruktur sehingga apa yang diharapkan Presiden Joko Widodo dalam pidato yang disampaikan, ditindaklanjuti oleh para menteri.

#### Data 14

*"Ekosistem nasional yang produktif dan inovatif **tidak mungkin** tumbuh tanpa ekosistem hukum, politik, kebudayaan, dan pendidikan yang kondusif."* (D3.2. P3, Minggu, 16 Agustus 2020)

Ekspresi penolakan merupakan suatu apresiasi dalam bentuk tindakan yang bertujuan untuk tidak menerima berbagai penguatan yang diberikan oleh mitra bicara. Ekspresi penguatan sebagai salah satu bentuk penindasan yang biasanya dialami bagi komunitas yang didominasi. Kata pada ekspresi penolakan yaitu kata tidak, tidak mungkin, bukan, dan belum bisa. Penggunaan ekspresi penolakan dalam teks ditandai dengan kata tidak mungkin.

Penggunaan kata tidak mungkin dalam teks menunjukkan sikap penolakan atau ketidaksetujuan terhadap pernyataan bahwa "Ekosistem nasional yang produktif dan inovatif tidak mungkin tumbuh tanpa ekosistem hukum, politik, kebudayaan, dan pendidikan yang kondusif". Penggunaan ekspresi penolakan dengan kata tidak mungkin mencerminkan pandangan atau keyakinan bahwa pernyataan tersebut tidak dapat diakui atau dianggap benar oleh Presiden Joko Widodo.

#### Data 15

*Krisis, resesi, dan pandemi itu seperti **api**. Kalau bisa, kita hindari, tetapi jika hal itu tetap terjadi, banyak hal yang bisa kita pelajari. **Api** memang membakar, tetapi juga sekaligus menerangi. Kalau terkendali, dia menginspirasi dan memotivasi. Dia menyakitkan, tetapi sekaligus juga menguatkan.* (D3.3. P3, Minggu, 16 Agustus 2020)

Ekspresi simbolik merupakan suatu apresiasi yang dikonstruksi penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya atau menguasai suatu wilayah tertentu. Kekuasaan simbolik sering kali menggunakan bentuk-bentuk lain yang lebih halus agar tidak mudah dikenali. Hal inilah yang membuat kelompok yang terdominasi sering kali merasa tidak keberatan untuk masuk ke dalam sebuah lingkaran dominasi. Nilai ekspresif yang menunjukkan ekspresi simbolik ditandai pada kata "api".

"Api" dalam arti yang sebenarnya merupakan panas dan cahaya yang berasal dari sesuatu yang terbakar. Tetapi penghasil teks dalam hal ini Presiden Joko Widodo menggunakan ekspresi simbolik untuk menggambarkan sifat dan dampak dari situasi

sulit seperti krisis, resesi, dan pandemi. Ekspresi simbolik ini menyamakan peristiwa sulit ini dengan api.

#### Data 16

*“Pada tahun percepatan pembangunan ini, Pemerintah fokus pada tiga langkah terobosan untuk **pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial**. Ketiga langkah itu adalah: yang pertama, percepatan pembangunan infrastruktur. Yang kedua, penyiapan kapasitas produktif dan Sumber Daya Manusia. Ketiga, deregulasi dan debirokratisasi.”* (D3.4. P1, Selasa, 16 Agustus 2016)

Nilai ekspresif digunakan penutur untuk memunculkan evaluasi terhadap realitas secara implisit melalui kosakata. Wujud fitur yang dianalisis, yakni evaluasi positif dan negatif. Evaluasi ini memandang bagaimana produsen teks akan menaruh penilaian ataupun pemikirannya terhadap realitas yang telah digambarkan dalam sebuah teks. Nilai ekspresif yang menunjukkan evaluasi positif ditandai dengan klausa “pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial”.

Klausa “pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial” merupakan evaluasi positif karena pemerintah memiliki niat positif dan fokus yang kuat dalam mengatasi tantangan seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan kesenjangan sosial melalui langkah-langkah yang dirancang untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kapasitas manusia, dan mengurangi hambatan birokrasi.

#### Data 17

*“Sampai sekarang **ekonomi global masih mengalami perlambatan**. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi nasional juga terpengaruh.”*  
(D3.4. P1, Selasa, 16 Agustus 2016)

Nilai ekspresif khususnya evaluasi negatif memberikan dampak kepada pembaca memaknai apa yang disampaikan oleh penghasil teks. Hal ini menunjukkan bahwa dengan penggunaan kata tertentu kemudian menghubungkannya dengan konteks penghasil teks mampu memberikan evaluasinya terhadap individu, golongan, atau kelompok di dalam teks yang ia hasilkan. Penggunaan leksikal “ekonomi global masih mengalami perlambatan” pada teks masuk ke dalam evaluasi negatif karena mengindikasikan kata-kata yang kurang baik didengar oleh khalayak atau pembaca.

Presiden Joko Widodo menyampaikan informasi tentang perlambatan ekonomi global dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Penggunaan leksikal yang mencirikan ekonomi global “masih mengalami perlambatan” memberikan nuansa negatif terhadap kondisi tersebut. Dengan kata-kata seperti itu, Presiden Widodo menyoroti atau mengevaluasi fakta bahwa situasi ekonomi global tidak menggembirakan, dan hal tersebut berdampak pada pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional.

Representasi kekuasaan Presiden Joko Widodo yang ditunjukkan melalui penggunaan leksikal “masih mengalami perlambatan” mencerminkan pemahaman dan penilaian negatif terhadap kondisi ekonomi global. Penggunaan kata-kata yang mengindikasikan perlambatan ekonomi global memberikan kesan bahwa Presiden Widodo prihatin atau khawatir terhadap situasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi global perlu dipercepat peningkatannya.

## **Pembahasan**

Nilai eksperensial dalam penelitian ini adalah nilai yang memiliki relasi makna dalam teks dan berupaya menspesifikasikan basis-basis ideologi yang meliputi kata-kata meyakinkan, dramatis, dan komunikatif. Analisis nilai eksperensial dalam teks pidato presiden Joko Widodo memberikan wawasan tentang bagaimana ideologi yang diperjuangkan oleh pemerintah tercermin dalam penggunaan bahasa yang strategis dan penuh makna.

Melalui analisis nilai eksperensial dalam pidato presiden Joko Widodo, dapat dilihat bahwa penggunaan bahasa yang strategis dan penuh makna memainkan peran penting dalam menyampaikan ideologi pemerintah. Nilai-nilai ideologis ini tidak hanya mencerminkan komitmen dan prioritas pemerintah, tetapi juga menunjukkan upaya untuk mengontrol dan mempengaruhi tindakan-tindakan konkret dari berbagai kementerian. Pidato presiden sebagai bentuk komunikasi politik menjadi sarana penting untuk meyakinkan, menginspirasi, dan menggerakkan berbagai elemen masyarakat serta institusi pemerintah dalam mencapai tujuan nasional.

Nilai relasional dalam teks pidato merujuk pada penggunaan bahasa yang menciptakan dan mencerminkan relasi sosial antara pembicara dan audiens. Ini mencakup penggunaan kata-kata yang menghaluskan makna dan kata-kata formal yang sering digunakan oleh kalangan kelas atas. Dalam konteks pidato Presiden Joko Widodo, nilai relasional dapat dianalisis melalui penggunaan kalimat imperatif, modalitas, dan kata ganti yang mencerminkan otoritas dan hubungan antara presiden dan audiensnya.

Nilai relasional dalam pidato Presiden Joko Widodo mencerminkan otoritas dan kekuasaan presiden dalam memberikan instruksi, mengarahkan kebijakan, serta membangun solidaritas dan kerja sama dengan masyarakat dan institusi pemerintahan. Penggunaan kalimat imperatif, modalitas, dan kata ganti memperkuat relasi sosial antara presiden dan audiensnya, menunjukkan bagaimana bahasa digunakan untuk mempengaruhi dan mengarahkan tindakan kolektif.

Nilai ekspresif dalam penelitian ini merujuk pada evaluasi yang dilakukan oleh penutur mengenai realitas yang terkait. Dalam konteks pidato Presiden Joko Widodo, nilai ekspresif tersebut dapat dianalisis melalui penggunaan kosakata dan struktur kalimat yang menggambarkan pandangan dan penilaian presiden terhadap berbagai isu. Berikut adalah pembahasan beberapa data yang ditemukan dalam teks pidato Presiden Joko Widodo. Nilai ekspresif dalam pidato Presiden Joko Widodo mencerminkan berbagai evaluasi positif dan negatif terhadap realitas yang dihadapi, serta menyoroti komitmen dan pandangan presiden dalam menghadapi berbagai isu nasional dan global.

## **Simpulan**

Nilai eksperensial yang mengandung kekuasaan dalam teks pidato Presiden Joko Widodo menggunakan kata, frasa, klausa, maupun kalimat yang digunakan untuk mengonstruksi, mengontrol, dan menanamkan ideologi atau gagasan yang dituangkan dalam teks memiliki muatan ideologis untuk menjalankan kekuasaan meliputi kata-kata ideologis yang diperjuangkan, proses leksikalisasi, dan metafora.

Nilai relasional yang mengandung kekuasaan dalam teks pidato Presiden Joko Widodo menggunakan kata, frasa, klausa, maupun kalimat yang digunakan untuk mengonstruksi, mengontrol, dan menanamkan ideologi atau gagasan yang dituangkan dalam teks memiliki muatan ideologis untuk menjalankan kekuasaan meliputi penggunaan kalimat perintah, modalitas (akan, harus, mampu, ingin), dan kata ganti.

Nilai ekspresif yang mengandung kekuasaan dalam teks pidato Presiden Joko Widodo menggunakan kata, frasa, klausa, maupun kalimat yang digunakan untuk mengonstruksi, mengontrol, dan menanamkan ideologi atau gagasan yang dituangkan dalam teks memiliki muatan ideologis untuk menjalankan kekuasaan meliputi penggunaan ekspresi penguatan, ekspresi penolakan, ekspresi simbolik, evaluasi positif, dan evaluasi negatif.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, saudara sedarah, saudara tak sedarah, sahabat-sahabat, dan seluruh yang memberikan bantuan baik bantuan tenaga maupun moril sehingga artikel ini bisa terselesaikan. Terkhusus ucapan terima kasih kepada dosen pembimbingku yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan Prof. Dr. Jufri, M.Pd. dan Prof. Ambo Dalle, M.Hum.

### **Daftar Pustaka**

- Dardjowidjojo, Soenjono, 2003. *Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Eriyanto. 2003. *Analisis Wacana "Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Fowler, Roger, Bob Hodge, Gunther Kress, & Tony Trew. 2019. *Language and Control*. London: Routledge Library Edition.
- Jubaedah, Siti, Hendra Setiawan, dan Ferina Meliasanti. 2021. Analisis Kalimat Imperatif pada Pidato Nadiem Makarim Rekomendasi sebagai Bahan Ajar Teks Pidato Persuasif. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 6: 3808-3815.
- Jufri. 2006. Struktur Wacana dalam Lontara La Galigo. *PhD diss.*, Universitas Negeri Malang.
- Maulina, Yeni. "Penggunaan Konjungsi dalam Wacana Pembelajaran Literasi." *Madah: Jurnal Bahasa dan Sastra* 9, no. 2 (2018): 191-202.
- Nursiyamsih, Dwi, dan Yakub Nasucha. 2013. Analisis Keterangan Aspek pada Cerpen Surat Kabar Solopos Edisi Desember 2012 (Tinjauan Sintaksis)." *PhD diss.*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rifiwanti, Intan, Etin Pujihastuti, dan Lalita Melasarianti. 2020. Modalitas Dalam Tajuk Rencana Kompas Edisi Oktober 2018. *Prawara: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 1, no. 1: 24-36.
- Simanihuruk, Bertova. "Analisis Wacana Kritis Pidato Nadiem Makarim 2019." *Jurnal Sintaksis* 2, no. 2 (2020): 71-78.
- Syafar, Dian Noviani. 2016. Negasi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. *Jurnal Arbitrer* 3, no. 1: 1-11.